

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari masalah kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan, dan pendidikan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa diukur melalui tingkat pendapatan riil per kapita yang tinggi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut.<sup>1</sup> Secara umum pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secepat mungkin dan menaikkan tingkat dan mutu hidup rakyat.<sup>2</sup>

Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha bersama untuk mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.<sup>3</sup> Tinggi rendahnya pendidikan dan partisipasi angkatan kerja masyarakat dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur dari pendapatan per kapita masyarakat secara nyata. Harapan masyarakat agar pendidikan memperoleh prioritas utama dalam meningkatkan pembangunan suatu negara agar terbebas dari kebodohan dan keterbelakangan. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi wilayah, yang harus diperhatikan adalah meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ketahun dan partisipasi angkatan kerja masyarakat yang bekerja setiap tahunnya meningkat.

Meskipun sekarang pemerintah mencanangkan subsidi untuk pendidikan dianggarkan 20 persen dari APBN, namun pada kenyataannya biaya pendidikan yang

---

<sup>1</sup> Robinson, *Ekonomi Regional, teori dan Aplikasi Edisi Remisi*, (Bumi Aksara, 2005) hlm 28.

<sup>2</sup> Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Persektif Islam*, Penerjemah dan Pengantar: Ikhwan Abidin Basri, MA. (Bumi Aksara 2008) hlm 76.

<sup>3</sup> BPS, *Statistik Pendidikan Provinsi Bali 2008*, hlm 28.

dirasakan oleh orang tua siswa semakin besar dan meningkat, akibatnya banyak orang tua siswa yang tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan, dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.<sup>4</sup> Namun sekarang sekolah tempat mengenyam pendidikan secara formal berkembang menjadi industri yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi. Ciri yang menonjol adalah dengan menjamurnya sekolah negeri yang menerapkan sekolah berbasis internasional (SBI), sekolah rintisan berbasis internasional (SRBI), dimana sekolah bersangkutan bisa menentukan sendiri biaya pendidikan kepada siswa.

Tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dimana laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya terdapat pada daerah yang masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi akan memberikan motivasi kerja yang lebih baik, dan akan berbeda dengan daerah yang laju pertumbuhan ekonominya rendah, karena masih banyak terdapat jumlah penduduknya yang memiliki tingkat pendidikan rendah bahkan masih banyak yang buta aksara. Masyarakat yang tertinggal pada umumnya pendidikannya rendah bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal dari kecil, dan ini masih banyak dijumpai pada beberapa kabupaten dan kota yang ada di Bali, sehingga tingkat laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah di Bali pertumbuhannya tidak sama. PDRB merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan

---

<sup>4</sup> BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Bali 2008, hlm 1.

masyarakat tertentu per tahun, sehingga pertumbuhan ekonomi ditunjukkan untuk peningkatan yang berkelanjutan dari Produk Domestik Regional Bruto / PDRB.<sup>5</sup>

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.<sup>6</sup> Penghitungan jumlah tenaga kerja dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas) dalam suatu negara. Angka tersebut biasanya didapatkan dari Sensus Penduduk. Sedangkan persentase tenaga kerja dalam satu negara dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia kerja dengan total jumlah penduduk. Semakin besar jumlah tenaga kerja dalam satu negara maka semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja, maka pengangguran akan terjadi, karena jumlah tamatan sekolah semakin tahun semakin meningkat. Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang bekerja pada tahun 2008 sebagian besar penduduk yang bekerja berpendidikan sekolah dasar /SD. Jumlah penduduk yang bekerja pada kelompok ini sebesar 47,65 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pekerja di Bali masih relatif rendah.<sup>7</sup> Hal ini mendapat perhatian khusus karena tingkat pendidikan pekerja akan terlihat dengan produktivitas dan tingkat upah yang diperoleh, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara umum.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pulalah kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan,

---

<sup>5</sup> Hamrolie Harun, Analisis Peningkatan PAD, Cetakan pertama 2004/2005 (BPFE – Yogyakarta, 2004), hlm 28.

<sup>6</sup> BPS, Sensus Penduduk, 2004

<sup>7</sup> BPS, Statistik Ketenagakerjaan Provisnsi bali 2008, hlm 18.

ketertiban umum, sosial, kebudayaan, dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya, atau dengan kata lain semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari: Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>8</sup>

Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumberdaya. Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik yang dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan akan sarana dan prasarana. Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja suatu daerah. Secara tradisional pertumbuhan ekonomi ditunjukkan untuk peningkatan yang berkelanjutan dari Produk Domestik Regional Bruto.<sup>9</sup>

Jika ilmu ekonomi pembangunan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan kesemua lapisan masyarakat secepat mungkin. Hal ini dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi dengan mengandalkan variabel-variabel ekonomi dan pemenuhan kepentingan pribadi. Kesejahteraan dalam arti luas mungkin akan sulit dicapai tanpa adanya dukungan dari faktor sosio-ekonomi dan politik yang relevan.<sup>10</sup>

Dalam laju Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak saja dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan, partisipasi angkatan kerja masyarakat, dan pendapatan asli

---

<sup>8</sup> Halim Abdul, Pengaruh Dana Alokasi Umum dan PAD Terhadap Balanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali, 2004, halm 5.

<sup>9</sup> Kuncoro, Mudrajat, Otonomi dan Pembangunan daerah, Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang, (Penerbit Erlangga, 2004) hlm 86.

<sup>10</sup> Umer Chapra, Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Persepektif Islam, Penerjemah dan Pengantar: Ikhwani Abidin Basri, MA (Bumi Aksara, 2008), hlm 76.

daerah tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti motivasi kerja, sarana prasarana, Keadaan alam, keamanan, dan lingkungan sekitar.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka perlu dikaji hubungan tingkat pendidikan, partisipasi angkatan kerja masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Bali.

### **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan tingkat pendidikan dan partisipasi angkatan kerja masyarakat terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali.
2. Bagaimanakah hubungan secara simultan dari tingkat pendidikan, partisipasi angkatan kerja masyarakat dan pendapatan asli daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Bali.

### **1.3. Batasan Masalah**

Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini, bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah di pengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat pendidikan masyarakat, partisipasi angkatan kerja masyarakat, dan pendapatan asli daerah (PAD). Tingkat pendidikan yang tinggi dengan sendirinya akan memiliki motivasi yang tinggi yang akan menimbulkan partisipasi angkatan kerja masyarakat yang tinggi pula untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Namun di Bali masih ada di beberapa kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi wilayahnya rendah karena masih banyak terdapat masyarakat yang putus sekolah bahkan ada jumlah masyarakat yang buta aksara cukup tinggi. Sampai tahun

2008, penduduk usia 15 tahun keatas yang masih buta aksara 13,06 persen.<sup>11</sup> Partisipasi angkatan kerja masyarakat sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi wilayah akan semakin baik. Partisipasi angkatan kerja masyarakat akan dilihat dari seberapa banyak masyarakat yang bekerja dibandingkan dengan banyak masyarakat yang ada di wilayah tersebut pada usia kerja.

Untuk dapat menetapkan terget PAD secara rasional maka perlu dilakukan langkah-langkah membuat proyek lima tahun mendatang, menghitung potensi PAD, dan menetapkan target rasional.<sup>12</sup> Pendapatan asli daerah (PAD) sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan kenyataan yang berkembang di masyarakat maka permasalahan tersebut perlu dibatasi, yakni bagaimana hubungan tingkat pendidikan, partisipasi angkatan kerja masyarakat dan pendapatan asli daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah di propinsi Bali.

#### **1.4. Identifikasi Masalah**

Berkaitan dengan laju pertumbuhan ekonomi wilayah, maka faktor yang mempengaruhi masalah peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, partisipasi angkatan kerja masyarakat, dan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga faktor penyusun yang mempengaruhi kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*).<sup>13</sup>

Secara riil tingkat pendidikan masyarakat terdiri dari tingkat pendidikan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Teori dasar yang digunakan sebagai landasan untuk mengkaji analisis kinerja masyarakat dalam hubungan dengan laju

---

<sup>11</sup> BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Bali tahun 2008, hlm 25.

<sup>12</sup> Hamrolie Harun, Analisis Peningkatan PAD (BPFE – Yogyakarta, 2004) hlm 55.

<sup>13</sup> Ridwan, Metode dan teknik Penyusunan tesis, ALFABETA. Bandung 2008, hlm231.

pertumbuhan ekonomi wilayah adalah teori tentang kinerja masyarakat yang diformulasikan oleh Keith Davis yaitu; *Human Performance = Ability + Motivation*.

Penelitian ini menggunakan variabel dan definisi operasional sebagai berikut: Tingkat pendidikan masyarakat adalah pendidikan formal yang pernah dialami oleh masyarakat dari SD sampai di perguruan tinggi. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan seseorang yang ditandai dengan lulus ujian akhir serta mendapatkan surat tanda tamat belajar atau ijazah.<sup>14</sup> Partisipasi angkatan kerja masyarakat adalah banyaknya masyarakat yang sudah bekerja pada wilayah tersebut dibandingkan dengan banyaknya angkatan kerja yang ada, baik yang sudah bekerja, sedang mencari kerja atau yang tidak bekerja. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita. PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan pendapatan yang sah lainnya.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.<sup>15</sup> Penghitungan jumlah tenaga kerja dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas) dalam suatu wilayah. Persentase tenaga kerja dalam satu wilayah dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia kerja dengan total jumlah penduduk pada usia kerja pada daerah tersebut.

---

<sup>14</sup> BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Bali Tahun 2008, hlm 9.

<sup>15</sup> BPS, Sensus Penduduk, 2004

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah.

Tingkat pendidikan adalah unsur-unsur yang berfungsi membentuk partisipasi angkatan kerja seseorang dalam menjalankan pekerjaan dan tugasnya.<sup>16</sup> Tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut semakin baik. Untuk kepentingan pendekatan dalam penelitian ini, selanjutnya teori tersebut akan diaplikasikan dengan menggunakan berbagai sumber rujukan yang telah dimodifikasi sesuai dengan fokus permasalahan yang akan dikaji. Jadi, identifikasi masalah yaitu: menjelaskan hubungan antara tingkat pendidikan, partisipasi angkatan kerja masyarakat dan pendapatan asli daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah.

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) gambaran tingkat pendidikan masyarakat, partisipasi angkatan kerja masyarakat, pendapatan asli daerah (PAD) dan laju pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) hubungan mengenai tingkat pendidikan, partisipasi angkatan kerja masyarakat terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali, dan (3) hubungan tingkat pendidikan, partisipasi kerja dan pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan dengan laju pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Bali.

### **1.6. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

#### **1.6.1. Kegunaan Teoritis**

---

<sup>16</sup> Nana Syaodih. Landasan Psikologi Proses Pendidikan, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2007, hlm 179.



- a. Sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu manajemen dalam mengelola manajemen sumber daya manusia sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian sumberdaya manusia yang akan datang.
- b. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu manajemen yang menyangkut pembangunan ekonomi wilayah Propinsi Bali.
- c. Menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan Pembangunan Ekonomi Wilayah di Provinsi Bali.

#### 1.6.2. Kegunaan Praktis

- a. Membantu masyarakat meningkatkan kemampuannya dalam menginterpretasikan fenomena-fenomena sosial/ekonomi yang kompleks dan saling berkaitan.
- b. Dapat mengatasi persoalan-persoalan sosial/ekonomi yang dihadapi.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Deskripsi Teori

##### 2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita. Secara rasional, pertumbuhan ekonomi ditunjukkan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah.<sup>17</sup> Pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa diukur melalui tingkat pendapatan riil per kapita yang tinggi.

Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan Tahun 1997 telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan perekonomian Daerah Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Walaupun pada tahap awal upaya pemulihan berjalan lambat, namun upaya pada tahap selanjutnya menampakkan arah yang lebih optimis bagi perkembangan perekonomian Daerah Bali. Pada saat puncak krisis perekonomian yang terjadi Tahun 1998, laju pertumbuhan ekonomi Bali mencapai minus 4,04%, ekonomi Bali mulai membaik yaitu menjadi 0,67% Tahun 1999, 3,05% Tahun 2000, 3,39% Tahun 2001, dan 3,15% Tahun 2002. Menurunnya pertumbuhan ekonomi tahun 2002 karena terjadinya tragedi bom Kuta, perang Irak, dan wabah SARS, yang berdampak terhadap turunnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali.<sup>18</sup>

Luas wilayah Provinsi Bali mencapai 5.634,40 ha. Jumlah penduduk sebesar 3,52 juta jiwa (Oktober 2008) dengan tingkat kepadatan penduduk 645 kilometer persegi.<sup>19</sup> Jumlah penduduk usia kerja 2,69 juta jiwa (Agustus 2008) dengan jumlah angkatan

---

<sup>17</sup> Kuncoro Mudrajat, Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga, 2004 hlm 86.

<sup>18</sup> [www.baliprov.go.id](http://www.baliprov.go.id) Profil Prov Bali mencakup data penduduk, sumber daya alam dan ekonomi makro (Asrani, Kholidah. 2008). hlm 2.

<sup>19</sup> BPS, Penduduk Provinsi Bali 2008. Hasil Regresi Penduduk, hlm 10.

kerja mencapai 2,09 juta jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,03 juta jiwa, sedangkan pengangguran sebesar 69,5 ribu jiwa. Jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja sebesar 597 ribu jiwa. Sehingga Tingkat Partisipasi Aktif Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 77,9 persen, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,3 persen. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebanyak 166 ribu jiwa (6,63 persen) dimana 89,16 persen berada di pedesaan. Upah Minimum Kota Denpasar tahun 2008 sebesar Rp 760.000. Jumlah penerima BLT (2005) menurut kategori sangat miskin sebanyak 45 ribu jiwa, penduduk miskin sebanyak 71 ribu jiwa, dan mendekati miskin sebanyak 32 ribu jiwa. Luas wilayah terbesar di Kabupaten Buleleng seluas 1.365,88 km<sup>2</sup> dan paling kecil Kota Denpasar dengan luas 127,78 km<sup>2</sup>.

Pertumbuhan ekonomi tahunan di daerah ini sebesar 9,9 persen. Sektor yang mengalami ekspansi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (26,5 persen), sektor industri (17,7 persen), sektor keuangan dan persewaan (14,2 persen) serta sektor perdagangan, hotel dan restoran (12,2 persen). Sementara sektor yang mengalami kontraksi adalah sektor pertanian (3,8 persen). Dari sisi permintaan, variabel yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi (21,3 persen) dengan angka sebesar 60 persen dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi.<sup>20</sup> Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1,39 triliun dengan realisasi mencapai Rp 1,68 triliun (120,96 persen dari target pendapatan), sedangkan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1,6 triliun dengan realisasi Rp 1,5 triliun (88,25 persen dari target belanja). Anggaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp274,6 miliar dengan realisasi sebesar Rp266,7 miliar (97,12 persen)

Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,1 triliun (136,29 persen), Dana Perimbangan Rp540,25 miliar (97 persen) dan lain-lain

---

<sup>20</sup> [www.baliprov.go.id](http://www.baliprov.go.id) Profil Prov Bali mencakup data penduduk, sumber daya alam, dan ekonomi makro. (Asrani, Kholidah. 2008) hlm 2

Pendapatan yang Sah Rp35,34 miliar (164,03 persen). Realisasi PAD berasal dari Pajak Daerah Rp945,97 miliar (135,36 persen), Retribusi Daerah Rp18,95 miliar (134,69 persen), Hasil PMD dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp45,59 miliar (93,44 persen) serta Lain-lain PAD yang Sah Rp93,46 miliar (193,48 persen). Realisasi Dana Perimbangan terdiri dari Bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp79,09 miliar (90,77 persen), Dana Alokasi Umum (DAU) Rp448,19 miliar (100 persen) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp12,98 miliar (60 persen). Sedangkan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Pendapatan hibah Rp20 miliar (100 persen) dan Sumbangan Pihak Ketiga Rp15,34 miliar (992,7 persen). Realisasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp1,03 triliun (89,59 persen) dan Belanja Langsung Rp438,69 miliar (85,26 persen). Realisasi Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai Rp372,93 miliar (87,82 persen), Belanja Subsidi Rp3,3 miliar (100 persen), Belanja Hibah Rp128,61 miliar (85,99 persen), Belanja Bantuan Sosial Rp151,17 miliar (97,08 persen), Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota/Desa Rp287,26 miliar (99,34 persen), Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota/Desa Rp85,73 miliar (71,32 persen) serta Belanja Tidak Terduga Rp31,1 juta (0,52 persen). Untuk realisasi Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai Rp40,69 miliar (76,56 persen), Belanja Barang dan Jasa Rp276,04 miliar (86,52 persen) dan Belanja Modal Rp121,96 miliar (85,69 persen).<sup>21</sup>

Perkembangan ekonomi Bali yang ditunjukkan oleh struktur ekonomi yang kenyal, senantiasa dapat dengan cepat keluar dari dampak berbagai krisis. Sebelum terjadinya krisis perekonomian secara nasional, laju pertumbuhan ekonomi daerah Bali rata – rata mencapai 7% pertahun. Setelah mengalami penurunan pada masa krisis Tahun 1998 (minus 4,04%) dan pada Tahun 1999 sebesar 0,67%, maka pada Tahun

---

<sup>21</sup> [www.baliprov.go.id](http://www.baliprov.go.id) Profil Prov Bali mencakup data penduduk, sumber daya alam, dan ekonomi makro, (Arsani, Kholidah. 2008). Hlm 3

2000 dan Tahun 2001 pertumbuhan ekonomi sudah menampakkan peningkatan, yaitu masing – masing sebesar 3,05% dan 3,39% serta Tahun 2002 menurun menjadi 3,15% karena adanya tragedi Kuta dan merebaknya isu SARS. Selanjutnya perkembangan kepariwisataan sudah mulai membaik dan memberikan indikasi bahwa perkembangan perekonomian Bali sedikit demi sedikit sudah mengalami pemulihan yang mengarah pada tahap pematapan. Perkembangan sektor primer selama periode 1998 – 2002 banyak disumbangkan sektor pertanian, pada Tahun 1998 (saat puncak krisis) sebesar 24,05% dan Tahun 2001 mencapai 21,37% dan Tahun 2002 sebesar 21,47%. Hal ini menunjukkan ketahanan sektor primer terutama pertanian relatif lebih baik terhadap gejolak krisis dibanding sektor lainnya.

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 563.286 Ha ( $5.632,86 \text{ km}^2$ ) atau 0,29% dari luas wilayah Indonesia. Jumlah penduduk pada tahun 2000 sebanyak 3.146.999 jiwa dengan kepadatan 558 jiwa/  $\text{km}^2$  dan pertumbuhan penduduk rata-rata mencapai 1,26% per tahun dalam periode Tahun 1990-2000. Secara administrative Provinsi Bali dibagi menjadi 8 Kabupaten dan 1 Kota, 55 Kecamatan, 678 Desa/Kelurahan, 1.404 Desa Pakraman tahun 2002. Berdasarkan pola penggunaan lahan Tahun 2000 terdiri atas 5,95% tanah pemukiman, 15,83% tanah sawah, 23,21% kawasan hutan, 43,85% perkebunan dan tegalan, 7,58% kritis, 0,64% danau/waduk dan 2,96% lain-lain. Pola penggunaan lahan ini cenderung mengalami perubahan setiap tahunnya karena adanya alih fungsi lahan, terutama dari lahan pertanian menjadi pemukiman atau prasarana lainnya sebagai akibat pesatnya pembangunan daerah Bali. Disisi lain daerah Bali memiliki sumber daya alam terbatas yang tidak dapat diolah untuk mendatangkan devisa bagi daerah dan Negara. Pada akhir tahun 2008 jumlah penduduk masyarakat Bali 3.409.845 jiwa dengan jumlah laki-laki 1.709.894 dan perempuan 1.699.894

dengan jumlah 858.457 keluarga.<sup>22</sup> Disamping itu masyarakat Bali juga memiliki nilai-nilai budaya yang unik menjadikan daya tarik bagi wisatawan nusantara dan mancanegara dan sekaligus menjadi landasan pembangunan daerah Bali, serta memiliki ketrampilan dibidang seni yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, daerah dan Negara.

Ketimpangan pembangunan perekonomian yang selama ini lebih memusatkan pada tingginya tingkat pertumbuhan telah mengakibatkan terjadinya ketimpangan perkembangan pembangunan antar Kabupaten/Kota, antar sektor, dan antar pedesaan perkotaan. Peranan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB mengalami penurunan dari 23,31% tahun 1998 menjadi 22,10% Tahun 1999 dan 20,61% Tahun 2000, yang selanjutnya Tahun 2001-2002 mengalami peningkatan masing-masing menjadi 20,68% dan 20,77%. Posisi tawar produk pertanian sangat lemah dan diikuti pendapatan petani rendah, dimana hasil yang diperoleh (output) dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan (input) tidak memberikan nilai ekonomis yang memadai. Disamping mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar sektor, pembangunan perekonomian Bali juga telah mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah, antara lain ditunjukkan oleh perbedaan kemampuan PAD yang sangat tajam antara Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yang juga berakibat pada ketimpangan pendapatan perkapita pada Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar dengan pendapatan perkapita pada kabupaten lainnya. PDRB perkapita Tahun 2002 per Kabupaten/Kota dan rata-rata Bali adalah : Jembrana Rp. 5,780 juta, Tabanan Rp. 4,829 juta, Badung Rp. 13,109 juta, Gianyar Rp. 6,530 juta, Klungkung Rp. 6,424 juta, Bangli Rp. 4,804 juta, Karangasem Rp. 3,957 juta, Buleleng Rp. 4,783 juta, Denpasar Rp. 7,564 juta, dan rata-rata Bali Rp. 6,855 juta. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditunjukkan untuk

---

<sup>22</sup> BPS, Penduduk Provinsi Bali 2008. Hasil Regresi Penduduk, hlm 10.

peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB.<sup>23</sup> Dimana pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan *output* per kapita.

## 2.2. Proses Pendidikan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang mesti mendapat perhatian khusus dalam pembangunan. Pada umumnya semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat kualitas taraf hidup mereka akan semakin meningkat. Kendalanya adalah tingginya biaya pendidikan menyebabkan masyarakat yang bertaraf hidup rendah tidak mampu menikmati pendidikan yang lebih tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan memperluas wawasan serta pengembangan daya malar sehingga memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu.<sup>24</sup> Belajar adalah suatu proses internal yang dimanifestasikan dalam perilaku, suatu upaya untuk mengubah perilaku melalui pengalaman. Belajar secara luas merupakan kegiatan belajar yang dilakukan di luar sekolah, oleh siswa atau bukan siswa, anak atau orang dewasa, menggunakan berbagai macam media pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendidikan, sedangkan mendidik adalah memberikan, menanamkan, menumbuhkan nilai-nilai pada peserta didik.

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berlangsung dalam lingkungan tertentu.<sup>25</sup> Dalam saling mempengaruhi ini peranan pendidik lebih besar, karena kedudukannya sebagai orang yang lebih dewasa, lebih berpengalaman, lebih banyak menguasai nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan terkait dengan nilai-nilai, mendidik berarti “memberikan, menanamkan, menumbuhkan “nilai-nilai pada

---

<sup>23</sup> Hamrolie Harun, Analisis peningkatan PAD, Cetakan pertama 2004/2005 (BPFE – Yogyakarta).hlm55

<sup>24</sup> BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Bali 2005, hlm 1

<sup>25</sup> Nana .S, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007 hlm 87.

peserta didik”. Kata memberikan dan menanamkan nilai, lebih menetapkan peserta didik dalam posisi pasif, menerima, mendapatkan nilai-nilai. Kata pendidik sebagai peserta didik yang aktif dan berdidik sebagai mendidik diri sendiri bisa saja digunakan, sebab hal itu bisa terjadi. Pendidik berfungsi membantu peserta didik dalam mengembangkan dirinya, yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik pribadinya ke arah yang positif, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pendidikan berfungsi mengembangkan apa yang secara potensial dan aktual telah dimiliki peserta didik, sebab peserta didik bukanlah gelas kosong yang harus diisi dari luar.

Proses pendidikan terarah pada peningkatan penguasaan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pengembangan sikap dan nilai-nilai dalam rangka pembentukan dan pengembangan diri peserta didik. Pengembangan diri ini dibutuhkan, untuk menghadapi tugas-tugas dalam kehidupannya sebagai pribadi, sebagai siswa, karyawan, profesional maupun sebagai warga masyarakat. Pendidikan selalu diarahkan kepada permasalahan dan kesejahteraan peserta didik dan masyarakat. Karena tujuannya positif maka proses pendidikannya juga harus selalu positif, konstruktif, normatif. Tujuan yang normatif tidak mungkin dapat dicapai dengan perbuatan yang tidak normatif pula.

Proses pendidikan selalu berlangsung dalam suatu lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan ini mencakup lingkungan fisik, sosial, intelektual, dan nilai-nilai. Lingkungan fisik terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia, yang merupakan tempat dan sekaligus memberikan dukungan dan kadang-kadang juga hambatan bagi berlangsungnya proses pendidikan. Lingkungan sosial merupakan lingkungan pergaulan antara manusia, pergaulan antar pendidik dengan peserta didik serta orang-orang lainnya yang terlibat dalam interaksi pendidikan. Tiap orang memiliki karakteristik pribadi masing-masing, sebagai individu maupun sebagai



anggota kelompok. Demikian juga dengan corak pergaulan, akan memberikan pengaruh terhadap peserta didik. Lingkungan intelektual merupakan kondisi dan iklim sekitar yang mendorong dan menunjang pengembangan kemampuan berpikir. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan-lingkungan kerja. Keluarga seringkali disebut sebagai lingkungan pertama, sebab dalam lingkungan inilah pertama-tama anak mendapatkan pendidikan, bimbingan, asuhan, pembiasaan, dan latihan. Diantara aspek-aspek kehidupan tersebut, pendidikan menempati kedudukan yang paling sentral dalam kehidupan keluarga, sebab ada suatu kecenderungan yang sangat kuat pada manusia, bahwa ingin melestarikan keturunannya, dan ini dapat dicapai melalui pendidikan.<sup>26</sup> Cita-cita orang tua tentang anak dan cucunya direalisasikan melalui pendidikan.

Antara tingkat pendidikan dan kesejahteraan penduduk pada tahun 2008 menunjukkan hubungan yang positif, artinya makin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, makin tinggi pula kesejahteraan penduduk yang bersangkutan. Secara normatif kualitas penduduk di Bali relatif baik jika penduduk umur 10 tahun ke atas yang pendidikan minimal tamat SLTP mendekati 100 persen. Namun hingga tahun 2008 di Bali masih terdapat 13 persen penduduk usia 15 tahun keatas yang belum melek huruf. Sebaran penduduk buta huruf di bali sebagian besar ada di Kabupaten Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem.<sup>27</sup>

Sebagai Pusat daerah pemerintahan Provinsi Bali, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung merupakan daerah yang memiliki sarana dan prasarana paling lengkap sehingga menjadi tujuan para pendatang termasuk pendatang dari daerah kabupaten

---

<sup>26</sup> Syaiful Bahri, Psikologi Belajar, (Bandung, 2005) hlm 73

<sup>27</sup> BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Bali 2008, hlm 32.

lain yang pendidikannya telah meningkat. Mereka umumnya ingin mendapatkan pendidikan dan pekerjaan di dua daerah tersebut.<sup>28</sup>

### 2.3. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. (Sensus Penduduk, 2000). Sementara itu, penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus.<sup>29</sup> Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu.

Penghitungan APAK dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam usia kerja.

$$APK = \frac{\text{JumlahAngkatan Kerja (Bekerja + MencariKerja)}}{\text{JumlahPenduduk Yang Berusia 15 tahun Atau Lebih}} \times 100\%$$

$$APAK_{\text{Kel.umur}} = \frac{\sum \text{Angkatan Kerja (Bekerja + Mencari Pekerjaan) Kelompok Umur } i}{\sum \text{Penduduk Pada Kelompok Umur } i} \times 100\%$$

Data sebagai dasar penghitungan indikator ini bisa didapatkan dari Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Ketenagakerjaan

<sup>28</sup> BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Bali Tahun 2007, hlm 27.

<sup>29</sup> BPS, Sensus Penduduk 2004, hlm 12.

Nasional (Sakernas). Lihat lampiran untuk definisi variabelnya di bagian indikator angkatan kerja. Definisi ini berdasarkan kuesioner Susenas 2002, 2003 dan 2004. Berdasarkan data SP 2000, jumlah angkatan kerja sebanyak 97.433.125 orang dan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 139.991.800 orang, maka APAK Indonesia pada tahun 2000 adalah;  $APAK = 97.433.125 / 139.991.800 \times 100\% = 69.6\%$  .

Semakin tinggi APAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. Dari data SP 2000 terlihat bahwa penduduk yang berusia 15-19 tahun memiliki APAK yang terendah sedangkan mereka yang berusia 45-49 tahun memiliki APAK yang tertinggi. Tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas (lihat hasil Sensus Penduduk 1971, 1980 dan 1990). Namun sejak Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Indikator ini bermanfaat sebagai wacana bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun daerah dalam pembuatan rencana ketenagakerjaan di wilayahnya. Disamping itu, indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja atau penduduk usia kerja potensial yang dapat memproduksi barang dan jasa. Namun indikator ini hanya menghasilkan jumlah penduduk yang bisa bekerja sehingga kurang tepat untuk digunakan sebagai dasar perencanaan. Penghitungan jumlah tenaga kerja dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas) dalam suatu negara. Angka tersebut biasanya didapatkan dari Sensus Penduduk. Sedangkan persentase tenaga kerja dalam satu negara dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia kerja dengan total jumlah penduduk, dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Jumlah Tenaga Kerja = Penduduk usia 15 + Penduduk usia 16 + . . . . dan seterusnya

$$\% \text{ Tenaga Kerja} = \frac{\text{Jumlah Penduduk usia 15 tahun atau lebih}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

Data sebagai dasar penghitungan indikator ini bisa didapatkan dari Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial dan Ekonomi Nasional, dan Survei Ketenagakerjaan Nasional.<sup>30</sup> Semakin besar jumlah tenaga kerja dalam satu negara maka semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka pengangguran akan terjadi. Di samping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif. Menurut jenis kelamin terlihat bahwa pada tahun 2008 persentase penduduk laki-laki yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan persentase penduduk perempuan yang bekerja.<sup>31</sup> Penduduk laki-laki yang bekerja pada tahun 2008 berjumlah 1.116.600 orang (55,01 persen) dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,79 persen dari tahun 2007 dimana penduduk laki-laki yang bekerja 1.096.996 orang.

#### **2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah, sesuai dengan apa yang dikatakan Soedjito yaitu : “Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pulalah kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial,” kebudayaan, dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya, atau dengan kata lain semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat

---

<sup>30</sup> Susenas 2004, hlm 25

<sup>31</sup> BPS, Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Bali 2008, hlm 17.

PDRB adalah nilai dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat tertentu (dalam kurun waktu tertentu)/1tahun.<sup>32</sup> PDRB Harga Konstan : merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat daerah tertentu yang dinilai dengan rupiah dengan dasar perhitungan menggunakan harga tahun dasar tertentu, yang bermanfaat: untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dan untuk mengetahui *income* perkapita suatu daerah. PDRB Harga Berlaku merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat daerah tertentu yang dinilai dengan rupiah dengan dasar perhitungan menggunakan harga tahun bersangkutan, yang bermanfaat: untuk mengetahui tingkat inflasi pada masa lalu, dan untuk mengetahui perbandingan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan daerah lain.<sup>33</sup> Untuk dapat menetapkan target PAD secara rasional maka perlu dilakukan tiga langkah sebagai berikut: membuat proyek untuk lima tahun mendatang, menghitung potensi PAD, dan menetapkan target rasional.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah, sepanjang belum dimiliki / dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup> Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka dalam bunyi pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dicantumkan sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas: (a) Pendapatan asli daerah yaitu : Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, (b) Dana perimbangan, (c) Pinjaman daerah, (d) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

---

<sup>32</sup> Hamrolie Harun, Analisis Peningkatan PAD, cetakan pertama 2004/2005, (BPFE – Yogyakarta) hlm 55

<sup>33</sup> Hamrolie Harun, Analisis Peningkatan PAD, (BPFE-Yogyakarta, 2004) hlm 28.

<sup>34</sup> Halim A, Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemda, hal 16

Menurut kamus ilmiah populer, identifikasi adalah pengenalan atau pembuktian sama, jadi identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah : meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pada uraian terdahulu berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah

Studi Abdullah (2004), menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislative dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tetapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik.

Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum yang kemudian deserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Globalisasi merupakan suatu pengintegralan ekonomi secara global. Sejak ekonomi moderen berkembang, satu prinsip yang muncul tentang kebebasan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Hendrie Anto, Ekonomi Indonesia Memasuki Melinium III, (Yogyakarta, 2004). hlm 134

## B. Kerangka Berpikir

Secara psikologis, kemampuan (*Ability*) masyarakat terdiri dari kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan "reality" (*knowledge + skill*). Artinya, masyarakat memiliki potensi di atas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan yang trampil mengerjakan pekerjaan sehari-hari sebagai tenaga pekerja sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, masyarakat perlu ditempatkan pada pekerjaan dengan bidang yang sesuai dengan keahliannya.

Laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD) serta Dana Alokasi Umum Belanja Modal. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda yang bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan peranan faktor dari variabel dan definisi operasional sebagai berikut: Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti.<sup>36</sup> Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Pendapatan asli daerah terdiri dari : Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan pendapatan yang sah lainnya. Sedangkan Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita.

---

<sup>36</sup> BPS, Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Bali 2008 hlm 27.

Pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah belum sepenuhnya bisa diterapkan oleh semua sekolah yang ada di Indonesia karena banyak menemui hambatan, seperti kualitas dan mutu pendidikan yang dihasilkan. Sekolah gratis bisa diterapkan asal pemerintah tak menuntut mutu atau pendidikan asal bisa berjalan, namun di kota atau wilayah yang maju persoalan mutu pendidikan menjadi prioritas utama yang tentunya mutu pendidikan memerlukan biaya yang tidak kecil. Banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai biaya pendidikan yang semakin tinggi yang tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat pendidikan seseorang. Karena untuk memperoleh tingkat pendidikan yang tinggi seseorang harus mengeluarkan biaya yang tinggi pula, sehingga tidak semua masyarakat bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, meskipun kemauan untuk bersekolah sangat tinggi.

Tingkat pendidikan dan partisipasi angkatan kerja masyarakat adalah unsur-unsur yang berfungsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada nantinya akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang bekerja pada tahun 2008 sebagian besar penduduk yang bekerja berpendidikan sekolah dasar/SD.<sup>37</sup> Tinggi rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) sangat bergantung pada tingkat pendidikan, dan partisipasi angkatan kerja masyarakat. Tingkat pendidikan yang tinggi dengan sendirinya akan memiliki motivasi yang tinggi yang akan menimbulkan partisipasi angkatan kerja masyarakat yang tinggi pula untuk meningkatkan PAD yang selanjutnya berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

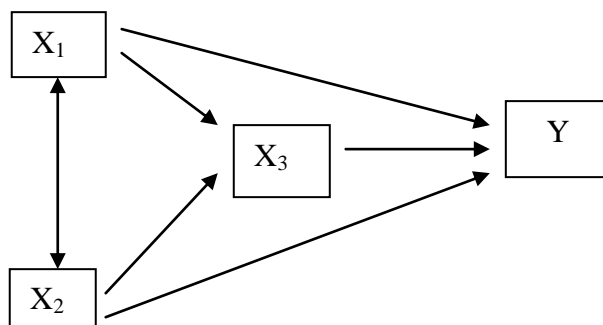
Kerangka hubungan kausal empiris antara jalur dapat dibuat melalui hubungan struktur tingkat pendidikan masyarakat, partisipasi angkatan kerja masyarakat, dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Bali,

---

<sup>37</sup> BPS, Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Bali 2008, hlm 18.



Dapat digambarkan seperti dibawah ini :



Gambar 1. Hubungan struktur tingkat pendidikan, partisipasi angkatan kerja masyarakat dan pendapatan asli daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Bali

Keterangan :  $X_1$  : Tingkat pendidikan masyarakat  
 $X_2$  : Partisipasi angkatan kerja masyarakat  
 $X_3$  : Pendapatan asli daerah  
 $Y$  : Laju pertumbuhan ekonomi wilayah

### C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan dan partisipasi angkatan kerja masyarakat berperan secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali.
2. Tingkat pendidikan, partisipasi angkatan kerja masyarakat dan pendapatan asli daerah berperan secara simultan dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Bali.